

TC MEDIA

I N S P I R A S I U N T U K B E R S I N E R G I





Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan

Sekretariat Pengadilan Pajak

Jl. Hayam Wuruk No.7 Jakarta Pusat

Laman

www.setpp.kemenkeu.go.id

Surel:

kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

Instagram

[@setpp.kemenkeu](https://www.instagram.com/setpp.kemenkeu)

[@tcmedia_pp](https://www.instagram.com/tcmedia_pp)

Contact Center

134

DAFTAR ISI

TC MEDIA Edisi 124 TAHUN 2022

Editorial	
Lekang tak berarti Hilang	5
Foto Kita	
Wajah Baru Layanan	6
Lintas peristiwa	8
Fokus	
Kilas Balik 2021	10
Tantangan Pengadilan Pajak	14
Melihat Pengadilan Pajak di Masa Depan	16
Lokus	
Menyambut Ruang Kerja Masa Depan	18
Cerita dari Dua Puluhan	26
Studi Banding e-Tax Court	30
Profil	
Pegawai Teladan 2021	20
Wajah Baru Gen Z	22
Rona	
Bedah Buku - No Hard Feelings	24
IT	
Koperasi dalam ASIK-PP	32
What's Happening	
Metaverse	34
Komik	
SiTaco: RKMD	35



Tim Penyusunan TC Media Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor KEP-05/SP/2022 tanggal 17 Januari 2022 **Pengarah I:** Sekretaris Pengadilan Pajak
Pengarah II: Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak
Penanggung Jawab: Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi
Redaktur Umum: Kepala Subbagian Informasi dan Publikasi
Redaktur Pelaksana: Gilang Pratama
Penyunting: M. Hafizullah Lubis
Desain Grafis dan Fotografer: Faishal Chairu Noor, Ridwan Firmansyah
Tim Redaksi: Gabriella Grace, Astris Dyah Perwita, Fadli Robby Mascha, Felixita Novelia, Mutia Rizki, Penny Febriana, Rahma Noor Fadhila, Rizki Damayanti

Inna Lillahi wa inna ilaihi raji'un

Awal tahun 2022 merupakan tahun yang diiringi duka bagi Pengadilan Pajak yang kehilangan 3 orang pegawai terbaiknya. Kepergiannya sungguh menjadi luka yang mendalam bagi segenap Hakim, Pejabat, dan Pegawai di Pengadilan Pajak. Dalam duka ini, kami memberikan penghormatan sebesar-besarnya atas jasa-jasa beliau selama mengabdikan untuk Bangsa dan Negara khususnya semasa beliau di Pengadilan Pajak. Terima kasih saudara, beristirahatlah dengan tenang dalam damai.



Firdaus

18 September 1970 - 7 Januari 2022

Pelaksana pada Subbagian Dokumentasi dan Yurisprudensi,
Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi

Fadli Robby Mascha

31 Januari 1986 - 31 Januari 2022

Pelaksana pada Subbagian Kepatuhan Internal,
Bagian Administrasi Putusan, Persidangan dan Kepatuhan Internal



Hilman Maulana

28 Oktober 1980 - 31 Maret 2022

Pelaksana pada Subbagian Administrasi Peninjauan Kembali,
Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi



Lekang tak berarti Hilang



Pertemuan G20

Drink, drank, drunk. Seorang guru Bahasa Inggris acap kali mengajari muridnya mengenai perubahan kata kerja berdasarkan waktu. Si murid bertanya-tanya, apa perbedaannya. *Drink* bermakna minum, *drank* bermakna minum, dan *drunk* pun bermakna minum. Ketiga kata ini sebenarnya merupakan satu kata yang sama. Hal yang membuatnya berbeda terletak pada waktu dimana kata tersebut berada. Ketika di masa sekarang, *drink* digunakan. Ketika di masa lampau, *drank* digunakan. Ketiganya masih berfungsi sebagai kata kerja. Benda yang sama, tetapi berubah karena adanya waktu.

Selama hujan akan panas jua, kiranya begitulah pepatah berkata. Tidak ada sesuatu pun yang tak lekang dari perubahan. Perubahan ini wujud sebagai jawaban atas tantangan waktu. Begitu pula Pengadilan Pajak yang turut senantiasa melakukan perubahan mengikuti waktu dimana ia berpijak. Masa lalu menciptakan pengalaman, masa sekarang melahirkan pedoman, masa depan menuaikan capaian.

Sejalan dengan hal tersebut, TC Media edisi kali ini memaparkan perjalanan Pengadilan Pajak dari waktu ke waktu, mulai dari kaleidoskop Pengadilan Pajak, tantangan yang harus dihadapi, impian Pengadilan Pajak di masa yang akan datang, sampai rubrik menarik lainnya yang dapat memperdalam khazanah wawasan mengenai Pengadilan Pajak dan sekitarnya.



Wajah Baru Pelayanan

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Lingkungan Pengadilan Pajak telah mengalami perubahan yang signifikan. Wajah baru TPT melambangkan komitmen Pengadilan Pajak untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.



Foto
Faishal Chairu



21/01

Teks
Astris
Foto
pexels.com



Vaksin Booster (Gel I dan II)

Jakarta, 21 Januari 2022. Dalam mencegah dan menghentikan penularan dan penyebaran COVID-19, Kementerian Keuangan mengadakan program Vaksin Booster atau vaksin tahap ketiga untuk para pegawai yang sudah memenuhi syarat vaksinasi. Tidak terkecuali pegawai Set. PP yang antusias untuk mendaftar dan mengikuti program ini. Pegawai yang telah melewati masa vaksin kedua minimal 6 bulan dan sehat secara fisik dijadwalkan secara masif untuk mendapatkan vaksin booster yang dilaksanakan di Gedung Dhanapala dalam 2 gelombang yaitu 21 Januari 2022 dan 4 Februari 2022. Sehat selalu Pegawai Set. PP, Kementerian Keuangan dan Rakyat Indonesia.

31/12

Teks Mutia
Foto dok. SetPP

SetPP Wrapped 2021

Jakarta, 31 Desember 2021. Bukan *Spotify Wrapped*, tetapi *SetPP Wrapped*! Konsepnya sama, yaitu kilas balik 'kegiatan' sepanjang tahun 2021. Acara yang diadakan pada 31 Desember 2021 ini disiarkan langsung dari loket layanan Gedung A yang baru saja direnovasi. *Highlight* acara ini adalah pengumuman *Best Performance Awards 2021*. Terdapat 6 pemenang pria dan wanita dengan rincian sbb, Kategori Esl. III : Bapak Achmad Hidajat dan Ibu Esti Cahya Inteni, Esl. IV: Bapak R. Chresno Wahyu Widodo dan Ibu Dara Puspitaningrum, Pelaksana: Bapak Ridwan Firmansyah dan Ibu Wiwied Septiana Agustien. Para pemenang mendapatkan bingkisan berupa logam mulia dan dapat berbincang dengan pimpinan terkait harapan SetPP ke depannya. Hello 2022, SetPP siap jadi lebih baik!

31/01

Teks
Astris
Foto
dok. SetPP



Arahan Terkait Kinerja dan Manajemen Risiko

Jakarta, 31 Januari 2022. Dalam rangka memasuki awal dan mengevaluasi capaian tahun lalu, Set PP menyelenggarakan acara Arahan Kinerja serta Manajemen Risiko. Pimpinan Set. PP serta pengelola memberikan arahan terkait hal-hal yang akan dihadapi Set PP untuk tahun 2022. Acara ini berlangsung pada 31 Januari 2022 dan dihadiri oleh Pimpinan Eselon 2 serta Eselon 3 bersama dengan Manajer Kinerja dan Manajer Pengelola Risiko terkait dengan media Zoom. Dengan acara ini, diharapkan kinerja Set. PP dapat terus tercapai dan poin risiko dapat diminimalkan sehingga menciptakan lingkungan kerja yang produktif.



04/02

Teks
Astris
Foto
dok. SetPP



30/03

Teks Felix
Foto dok. SetPP

20 Tahun Pengadilan Pajak

Jakarta, 30 Maret 2022 Pengadilan Pajak melaksanakan potong tumpeng dalam rangka menyambut 20 Tahun Pengadilan Pajak. Untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, acara tersebut hanya dihadiri oleh perwakilan Hakim serta Pegawai Pengadilan Pajak yang dilaksanakan di ruang Wakil Ketua III Pengadilan Pajak. Acara potong tumpeng ini merupakan wujud rasa syukur atas 20 Tahun Pengadilan Pajak. Diharapkan Pengadilan Pajak dapat selalu menjadi Pengadilan yang bebas, mandiri, tidak memihak dan terpercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan serta rasa keadilan masyarakat, yang berwibawa dan diakui dunia.

Sharing Session Format RSB/G Baru

Jakarta, 4 Februari 2022. Sehubungan dengan penerbitan Format RSB/G Baru dan antusiasme pegawai untuk mempelajari lebih jauh mengenai format tersebut, sejumlah pegawai bersama Tim Perspektif mengadakan Sharing Session yang dihadiri oleh para pelaksana majelis. Sharing Session yang bertajuk “Sharing Session Format RSB/G Baru” ini dilaksanakan pada 4 Februari 2022 dan diisi oleh narasumber Vicky Fitrah W. dan M. Taufiq Rahmananda. Diharapkan dengan adanya *sharing session* ini sosialisasi dari Format RSB/G baru dapat diterapkan dengan lebih efektif.

18/03

Teks Felix
Foto
dok. SetPP



8 Aksi Transformasi SetPP

Jakarta, 18 Maret 2022. Telah dilaksanakan Sosialisasi terkait *anchor statement* Sekretariat Pengadilan Pajak. Dalam sosialisasi tersebut Sekretaris Pengadilan Pajak menyampaikan terkait 8 Aksi Transformasi yang merupakan elaborasi dari *anchor statement*. 8 Aksi Transformasi tersebut yakni Pengembangan E-Tax Court, Regulasi Modernisasi Layanan, Benchmarking Persidangan Online, Profiling Sengketa Pajak, Strategi Pengurangan Dokumen Fisik, Manajemen Pemberkas, Ruang Kerja Masa Depan, serta Peningkatan Kompetensi Pegawai. Program ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola administrasi sengketa pajak yang modern dan akuntabel melalui transformasi digital manajemen sengketa pajak.

A man in a batik shirt and face mask is washing his hands at a public sink. Another person is visible in the background, also washing their hands. The scene is outdoors, possibly at a public facility or office entrance.

KILAS BALIK 2021

Tahun 2021 menjadi tahun kedua pandemi di Indonesia. Masyarakat mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam menghadapi virus Covid-19 yang masih mewabah. Sederet kebijakan digelontorkan pemerintah dalam penanganannya dan memastikan agar sektor-sektor pemerintahan dapat tetap melayani kepentingan masyarakat dengan baik, meskipun dalam keadaan yang penuh dengan keterbatasan.

Pengadilan Pajak sebagai salah satu institusi penegakan hukum di Indonesia turut serta dalam mentransformasi berbagai kebijakan untuk menjamin tetap terselenggaranya proses peradilan di era normal baru. Berkurangnya keleluasaan dalam menjalankan aktivitas secara normal agaknya menjadi pemicu Pengadilan Pajak dalam percepatan realisasi modernisasi persidangan yang telah dicanangkan sebelumnya.

Lantas bagaimana Pengadilan Pajak menghadapi tahun 2021 dengan kondisi wabah yang masih fluktuatif?

Satu tahun setelah Covid-19 mewabah di Indonesia tidak menjanjikan kondisi yang stabil begitu saja. Kenaikan angka kasus harian masyarakat yang terjangkit virus ini menyebabkan kita lagi-lagi harus menyesuaikan diri dan bersiap menghadapi perubahan demi perubahan kebijakan. Termasuk di Pengadilan Pajak sendiri. Di saat kondisi mulai terasa sedikit normal dan proses bisnis mulai berjalan lancar dengan berbagai perombakan di berbagai sisi, gelombang kedua Covid-19 datang yang memaksa kita untuk kembali berbenah. Menciptakan lagi inovasi dan kebijakan baru agar semua kegiatan dapat terus terselenggara dengan baik.

Protokol Kesehatan

Ilustrasi
Faisal Ch



Pelaksanaan Kegiatan secara Daring

Hal ini tentu menjadi sesuatu yang lumrah di era pandemi. Di saat kondisi membatasi pertemuan manusia secara fisik, maka teknologi menyambungkan tali yang sempat terputus tersebut. Begitu banyak acara-acara di Pengadilan Pajak yang sebelumnya diadakan secara langsung lantas dialihkan pelaksanaannya melalui media-media yang dikelola sendiri oleh tangan-tangan kreatif pegawai di Pengadilan Pajak.

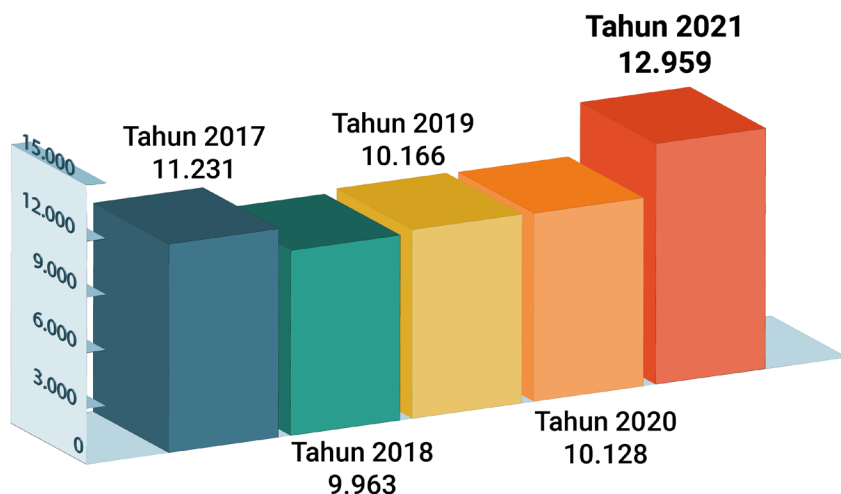
Pada tanggal 9 April 2021 Hari Lahir Pengadilan Pajak dirayakan bersama-sama oleh keluarga besar Pengadilan Pajak melalui aplikasi zoom. Diawali dengan webinar dengan Tema Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan yang Mampu Menciptakan Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Usai webinar, perayaan dilanjutkan dengan beberapa rangkaian acara antara lain Tax Court Award dan juga keseruan lain yang turut melibatkan semua pegawai. Disamping itu Pengadilan Pajak tetap menyelenggarakan kegiatan Bakti Sosial berupa pembagian sembako bagi seluruh tenaga pendukung di lingkungan Pengadilan Pajak.

Kemudian pada tanggal 28 Mei 2021 Pengadilan Pajak juga mengadakan acara Halal Bi Halal. Mengikuti arahan pemerintah pusat untuk tidak mudik, seluruh pegawai dan hakim di Pengadilan Pajak dapat merayakan lebaran bersama-sama. Walaupun diadakan secara daring namun suasana hangat tetap terasa apalagi didukung dengan tayangan video-video kreatif dari pegawai Set.PP.

Dan untuk pertama kalinya sejak virus Covid-19 mewabah di Indonesia, Pengadilan Pajak Kembali mengadakan Rapat Kerja pada tanggal 19 sampai dengan 26 November 2021 secara daring. Tidak hanya itu, untuk menutup tahun 2021 diadakan juga forum diskusi dan juga berbagai webinar diadakan untuk tetap memberikan pengetahuan dan ilmu kepada para pegawai.

Penghentian Persidangan Sementara

Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, gelombang kedua Covid-19 terjadi di pertengahan tahun 2021 yang memaksa seluruh kegiatan di Pengadilan Pajak harus dihentikan sementara mulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021.



Produksi Putusan Pengadilan Pajak Tahun 2017-2021

Kurang lebih satu bulan lamanya pelayanan ke pihak eksternal ditiadakan namun bukan berarti di internal Pengadilan Pajak berdiam diri. Justru hal ini menjadi pemantik untuk percepatan modernisasi persidangan di Pengadilan Pajak.

Dimulai dari pembentukan Tim Perumus Sidang Elektronik pada tanggal 28 Juli 2021. Tim ini bertugas melakukan evaluasi dan perumusan peraturan dalam rangka percepatan pelaksanaan sidang elektronik secara lebih luas di Pengadilan Pajak setelah sebelumnya sidang secara elektronik telah diberlakukan di majelis SDTK. Hingga pada tanggal 3 Agustus 2021 dengan berbagai penyempurnaan fasilitas, kompetensi dan kebijakan, sidang secara elektronik dilaksanakan secara keseluruhan. Hal ini sebagai bentuk komitmen Pengadilan Pajak dalam pelaksanaan modernisasi proses bisnis layanan persidangan.

Produksi Putusan

Namun terlepas dari segala keterbatasan dan juga halangan yang dihadapi selama tahun 2021, tidak menurunkan produktivitas putusan di Pengadilan Pajak. Selama tahun 2021 pembuatan putusan mencapai lebih dari 12.000 putusan dimana angka ini merupakan capaian tertinggi sejak Pengadilan Pajak berdiri.

Begitu banyak perubahan sebagai dampak daripada pandemi ini. Kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dapat terlaksana secara tatap muka dan dihadiri banyak orang kemudian harus dilakukan secara daring. Persidangan yang sebelumnya dapat dilakukan secara langsung lantas dapat diselenggarakan melalui aplikasi zoom dan para pihak dapat mengikuti dari mana saja.

Namun dalam segala keterbatasan dan pembatasan, Pengadilan Pajak tetap dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Semoga semangat pembaharuan di tahun 2021 dapat terus membuahkan hasil positif ke depannya hingga dapat mewujudkan modernisasi dalam proses administrasi dan persidangan di Pengadilan Pajak.

Teks: Riz

Tantangan Pengadilan Pajak

Perkembangan dunia yang sangat cepat dan kebiasaan masyarakat yang terus berubah membuat Pengadilan Pajak harus siap menghadapinya dengan selalu beradaptasi dan menawarkan solusi. Munculnya pandemi Covid-19 membuat beberapa rencana kerja Pengadilan Pajak harus direalisasikan dengan lebih cepat dari target waktu yang telah disusun sebelumnya. Dalam proses mewujudkan Pengadilan Pajak yang lebih baik, tentu dihadapkan dengan berbagai tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Lantas apa saja tantangan tersebut?

Penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Undang-undang ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. UU HPP memuat beberapa perubahan atas peraturan perpajakan sebelumnya, mengharmonisasi peraturan yang telah ada dan juga memuat peraturan mengenai pajak baru. Sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak, Pengadilan Pajak harus mampu beradaptasi dengan adanya UU HPP.

Ketidaksesuaian antara Peraturan pada Pengadilan Pajak dengan UU HPP

Peraturan di bidang perpajakan, dari Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) hingga UU HPP selalu mengalami perubahan atas dasar mengikuti perkembangan jaman. Dalam hubungannya dengan peraturan pada Pengadilan Pajak, UU HPP juga mengatur mengenai persyaratan pengajuan banding dan gugatan.

Tetapi pada UU HPP tersebut terdapat pasal yang bunyinya tidak selaras dengan apa yang ada pada UU PP. Perbedaan tersebut ada pada persyaratan mengenai pembayaran pajak terutang sebelum mengajukan banding atau gugatan. Pada pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP) menyatakan bahwa,

“Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).”

Dalam hal kelengkapan administrasi banding atau gugatan sesuai dengan Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak nomor: SE-08/PP/2017 tentang Perubahan atas Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-002/PP/2015 tentang Kelengkapan Administrasi Banding atau Gugatan (SE-08) pada huruf C angka (1) poin d disebutkan bahwa,

“Bukti pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang terutang sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP).”

Kedua peraturan tersebut tidak relevan dengan peraturan terbaru pada pasal 25 ayat (3a) UU KUP yang mengatur bahwa Wajib Pajak harus melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan pada saat pengajuan keberatan.

Didukung dengan penjelasan pada pasal 27 ayat (5f) UU KUP sttd UU HPP yang memperlihatkan penghitungannya, membuat pasal 36 ayat (4) UU PP dan SE-08 sudah tidak mengikuti perkembangan perubahan peraturan perpajakan. Perbedaan ini tentu saja membuat beberapa pihak kebingungan, termasuk para pegawai. Hal ini juga tidak sesuai dengan tujuan pembentukan UU HPP dalam hal mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Maka dari itu, diperlukan suatu landasan hukum baru di Pengadilan Pajak yang menyesuaikan dengan perubahan pada UU HPP.

Pengetahuan Penting Mengenai Peraturan Perpajakan yang Terbaru

Dalam rangka menyiapkan SDM Pengadilan Pajak yang agile dan kolaboratif serta menghadapi cepatnya perubahan peraturan di bidang perpajakan, Pengadilan Pajak telah menyelenggarakan sosialisasi UU HPP pada 22 Desember 2021. Selain membahas mengenai perubahan peraturan, dibahas juga mengenai peraturan perpajakan yang baru. Peraturan baru tersebut antara lain mengenai kebijakan prosedur persetujuan bersama, program pengungkapan sukarela dan pajak karbon.

Pada UU HPP diatur mengenai pengajuan MAP yang dapat dilakukan bersamaan dengan keberatan atau banding, dengan rincian yaitu pertama, MAP tetap dilanjutkan apabila materi dalam putusan banding atau peninjauan kembali bukan merupakan materi yang diajukan MAP. Kedua, MAP dihentikan apabila materi dalam putusan banding atau peninjauan kembali merupakan materi yang diajukan MAP. Terakhir, hasil MAP termasuk dasar pengembalian pajak atau penagihan pajak.

Selanjutnya mengenai program pengungkapan sukarela Wajib Pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, program ini dilaksanakan selama enam bulan mulai dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Program ini diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Program ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.

Dan terakhir mengenai pajak karbon, diatur pada BAB VI pasal 13 UU HPP. Pajak ini dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pajak karbon berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan pertama kali dikenakan terhadap badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik

SOSIALISASI



HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

tenaga uap batubara dengan tarif Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara.

Sistem Pengadilan Pajak secara Elektronik melalui e-Tax Court

Dalam mengikuti perkembangan jaman dan mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Pengadilan Pajak melalui blueprint Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2021-2024 telah menyusun rencana pembuatan suatu sistem elektronik dengan nama e-Tax Court yang akan memudahkan berbagai pihak dalam penyelesaian sengketa pajak. Munculnya pandemi Covid-19 telah mengubah kebiasaan-kebiasan masyarakat, termasuk di lingkungan badan peradilan. Sebelumnya, pemanfaatan teknologi informasi di Pengadilan Pajak hanya sebatas sebagai pendukung dalam pencatatan sengketa dan hanya digunakan secara internal. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 mendorong badan peradilan termasuk Pengadilan Pajak untuk mempercepat penggunaan sistem elektronik pada semua proses bisnisnya.

Berdasarkan kunjungan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan pada bulan Desember 2021 lalu, sistem elektronik Pengadilan Pajak ditargetkan akan dirilis lebih cepat dari target perilisasi sebelumnya. Tingkat transformasi menuju digitalisasi

juga menjadi inisiatif strategis Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2022. Pembuatan sistem e-Tax Court yang mewujudkan modernisasi dan digitalisasi ini diharapkan dapat memudahkan para pihak dan menghemat waktu dalam proses penyelesaian sengketa, mempercepat proses persuratan yang tidak lagi melalui pos, mengurangi tempat penyimpanan berkas karena tidak lagi menggunakan berkas fisik, mendukung jalannya proses persidangan di masa pandemi dengan sidang secara daring, memudahkan pegawai dan para pihak dalam mengakses data-data yang terintegrasi, serta memudahkan dalam pelaksanaan pengawasan.

Teks: Dhila

Melihat Pengadilan Pajak di Masa Depan

Berbicara tentang masa depan maka yang tak luput dari benak kita adalah rencana, harapan, cita-cita atau angan-angan. Sudah dua puluh tahun Pengadilan Pajak berdiri sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 pada tanggal 12 April 2002. Tentunya telah banyak hal yang dilalui mulai dari penerbitan peraturan-peraturan yang relevan hingga modernisasi Pengadilan Pajak.

Kedepannya banyak sekali rencana dan harapan untuk Pengadilan Pajak agar dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi pengadilan yang bebas, mandiri, tidak memihak serta terpercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan serta rasa keadilan masyarakat, yang berwibawa dan diakui dunia.

Oleh sebab itu melalui Instagram Sekretariat Pengadilan Pajak (@set.pp_kemenkeuri), TCMedia menanyakan kepada SobatPP terkait harapan untuk Pengadilan Pajak di masa depan dan berikut beberapa jawaban dari SobatPP:

“Berintegritas Tinggi dan Menegakan Keadilan Tanpa Pandang Bulu”

Sesuai dengan misi Pengadilan Pajak yaitu menyelenggarakan peradilan pajak secara profesional dan tidak memihak dengan keputusan yang adil dan efektif melalui proses yang transparan, akuntabel, cepat, sederhana,

dan murah, tentunya hal ini sangat menjadi prioritas utama Pengadilan Pajak dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Diharapkan kedepannya Pengadilan Pajak tetap dapat menjaga integritas dan mewujudkan penegakan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-undang, Peraturan dan rasa keadilan masyarakat dengan cepat, sederhana, dan murah.

Namun hal ini tidak dapat dicapai tanpa bantuan dari semua pihak, terutama dari pengguna layanan di Pengadilan Pajak. Dengan adanya saluran pengaduan, masyarakat dapat melaporkan hal-hal yang bertentangan dengan nilai integritas dan profesionalisme melalui email pengaduan.setpp@kemenkeu.go.id atau melalui website wise.kemenkeu.go.id. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam mewujudkan Pengadilan Pajak yang berintegritas tinggi dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.

“Semua serba digital, tidak ada lagi kertas-kertas atau dokumen fisik”

Pada era modern ini dengan semakin berkembangnya teknologi yang ada, penggunaan kertas sudah seharusnya diminimalisir. Hal ini juga sudah menjadi perhatian Pengadilan Pajak



salah satunya dengan pembuatan sistem e-Tax Court untuk mewujudkan modernisasi dan digitalisasi. Dengan sistem ini diharapkan dapat memudahkan para pihak dan menghemat waktu dalam proses penyelesaian sengketa, mempercepat proses persuratan yang tidak lagi melalui pos, mengurangi tempat penyimpanan berkas karena tidak lagi menggunakan berkas fisik, mendukung jalannya proses persidangan di masa pandemi dengan sidang secara daring, memudahkan pegawai dan para pihak dalam mengakses data-data yang terintegrasi, serta memudahkan dalam pelaksanaan pengawasan.

“Pindah ke gedung yang lebih bagus dan nyaman buat nunggu sidang”

Pengguna layanan tentu mengharapkan kenyamanan dalam mendapatkan layanan, salah satunya kenyamanan di ruang tunggu. Dalam menyikapi hal tersebut saat ini Pengadilan Pajak mulai melakukan perubahan serta perbaikan terkait tata ruang di Pengadilan Pajak, dimulai dengan Tempat Pelayanan Terpadu saat ini telah direnovasi sehingga semakin nyaman bagi para

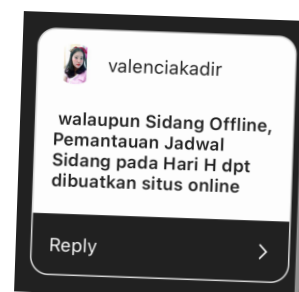
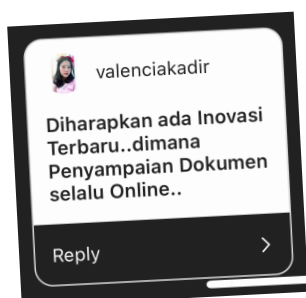
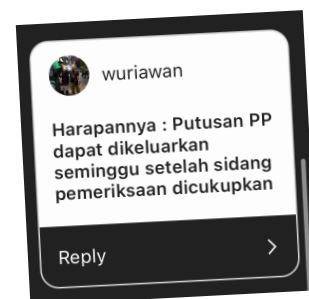
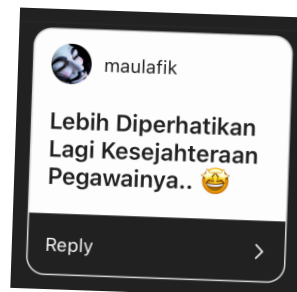
pengguna layanan dalam menggunakan layanan. Diharapkan kedepannya perbaikan tata ruang tersebut dapat dilaksanakan untuk Ruang Tunggu Pemohon Banding dan Ruang Tunggu Terbanding agar dapat meningkatkan kenyamanan pengguna layanan di Pengadilan Pajak.

Selain itu dengan telah dilaksanakannya persidangan secara elektronik, pengguna layanan tentu tidak perlu khawatir lagi terkait ruang tunggu karena pengguna layanan dapat melaksanakan persidangan baik di kantor, rumah maupun dimanapun selama berada di tempat yang dapat mendukung terlaksananya persidangan secara kondusif.

Ada begitu banyak harapan SobatPP untuk Pengadilan Pajak, semoga harapan-harapan yang telah disampaikan bisa segera terwujud sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelayanan di Pengadilan Pajak bagi seluruh pengguna layanan.

Teks: Felix

Harapan untuk Pengadilan Pajak



Menyambut

RUANG KERJA MASA DEPAN

“ Dalam rangka perwujudan *collaborative working space* maka Kementerian Keuangan secara bertahap ingin mengimplementasikan Ruang Kerja Masa Depan (RKMD) di semua satuan atau unit kerja.

Kementerian Keuangan telah secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam menjalankan transformasi birokrasi dan organisasi. Sejak pandemi Covid-19 berlangsung, reformasi birokrasi terus digaungkan dengan perkembangan yang sangat dinamis. Dimulai dari New Thinking of Working (NTOW) yang mengusung pengenalan konsep *Flexible Working Space* (FWS) dan *Flexible Working Hour* (FWH), kemudian bertransformasi menjadi *New Way of Working* (NWOW). NWOW merupakan kelanjutan dari NTOW dimana ruang lingkup NTOW adalah Penguatan Budaya, *Office Automation*, dan Kajian *Flexible Working* (*open space, remote working, flexy time*). Sedangkan pada NWOW penerapannya melingkupi *Collaborative Working Space* dan *Flexible Working Arrangement*.

Dalam rangka perwujudan *collaborative working space* maka Kementerian Keuangan secara bertahap ingin mengimplementasikan Ruang Kerja Masa Depan (RKMD) di semua satuan atau unit kerja. Pelaksanaan RKMD dilandasi oleh fenomena digitalisasi, dominasi pegawai milenial di Kementerian Keuangan dan globalisasi yang terakselerasi oleh digital disruption serta tuntutan yang timbul atas tekanan dan keterbatasan selama masa pandemi Covid-19.

Namun patut diketahui bersama bahwa RKMD hanya dapat terjadi jika beberapa kondisi sudah terpenuhi, yaitu kesiapan suatu organisasi dalam menggaungkan budaya kerja masa depan, SDM yang kompeten, regulasi yang jelas, manajemen kinerja yang baik dan tersedianya infrastruktur dan sistem *Data Analytics*. Selain itu beberapa prinsip dasar RKMD, antara lain *borderless organization*, kebijakan *delayering* yang modern, Harmonisasi, optimalisasi dan evaluasi, penyempurnaan kebijakan manajemen talenta, IT sebagai *enabler* dan *Project Based Team*.

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung penguatan budaya organisasi Kementerian Keuangan, Set.PP juga sudah membentuk tim untuk dapat mengimplementasikan RKMD di Set.PP. Dengan karakteristik pekerjaan dan proses bisnis Pengadilan Pajak, RKMD di Set.PP memiliki tantangannya tersendiri. Namun hal tersebut ternyata tidak mengurangi semangat dan juga optimisme para pegawai untuk dapat mewujudkan RKMD.

Berikut harapan para pegawai Set.PP terkait RKMD:

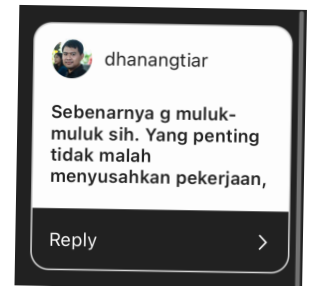
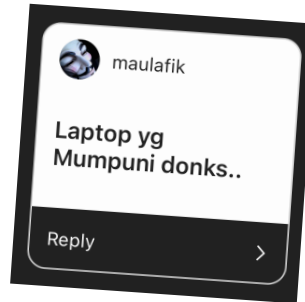
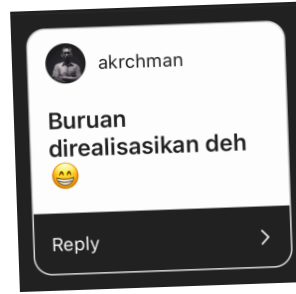
Saat ini sedang dilaksanakan kajian terkait RKMD serta beberapa Bagian dan juga Majelis juga sudah menjalankan *pilot project* RKMD. Mari kita terus dukung program kerja Tim RKMD di Set.PP dengan mempersiapkan dan membuka diri terhadap perubahan dan digitalisasi di masa mendatang.

Tentunya RKMD ini akan dipersiapkan dengan matang untuk bisa diadaptasi dengan proses bisnis dan pekerjaan di Pengadilan Pajak. Secara paralel, RKMD ini juga akan didukung dengan penguatan pemanfaatan infrastruktur dan sistem Teknologi Informasi yang lebih baik.

Dalam masa pandemi Covid-19, mempertimbangkan prokes juga menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan RKMD. Namun di sisi lain, RKMD juga menjadi salah satu konsep kerja yang lebih fleksibel sehingga bisa melakukan pekerjaan dari mana saja dan mengatur jarak dengan lebih leluasa. Namun dalam konsep RKMD kita juga harus menjaga kebersihan karena sebagian besar area merupakan *common space* yang bisa digunakan oleh siapa saja.

RKMD tentunya akan membawa warna dan nuansa baru dalam bekerja dan diharapkan juga bisa menjadi semangat baru bagi segenap pegawai di Set.PP, bukan hanya generasi muda. Kenyamanan dan juga ruang kerja yang dapat mendukung pegawai untuk dapat berpikir secara kreatif dan inovatif merupakan nilai yang fundamental dalam implementasi RKMD ini. Semoga RKMD bisa membawa para pegawai Set.PP untuk menjadi lebih imajinatif dalam menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan pada pekerjaan.

Teks: Penny



PEGAWAI TELADAN 2021

Nurita Ismawanti

Nurita Ismawanti tidak menyangka bahwa dirinya akan mendapatkan predikat sebagai Pegawai Teladan Tahun 2021. Menurut pegawai yang biasa dipanggil Ita ini, kandidat lain yang terpilih merupakan pegawai berkompeten dan tentunya sangat layak untuk mendapatkan predikat Pegawai Teladan Tahun 2021. Ketika ditanya perihal nilai tambah apa yang sekiranya membuatnya terpilih di antara kandidat lain, Ita menyampaikan bahwa sejujurnya tidak terlalu yakin, karena Ita merasa belum pantas mendapatkan predikat tersebut. Namun Ita menyampaikan bahwa mungkin ada beberapa hal atau kebiasaan yang dilakukannya ternyata berdampak bagi apa yang diraihinya saat ini.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kandidat pegawai teladan adalah tidak pernah pulang sebelum waktunya (PSW) atau tidak pernah terlambat masuk bekerja (TL) selama enam bulan berturut-turut. Ita menyampaikan bahwa di tengah kondisi pandemi seperti ini, dimana kita diberikan fasilitas untuk bekerja dari rumah (WFH), melakukan presensi secara tepat waktu menjadi tantangan tersendiri.

Ita menambahkan, tantangan makin terasa berat untuk pegawai yang mudah lupa seperti dirinya. Untuk Ita pribadi, cara agar tetap konsisten melakukan presensi secara tepat waktu adalah dengan membuat catatan-catatan kecil yang ditempelkan pada tempat yang mudah terlihat di area rumah. Ita juga melakukan upaya ekstra dengan memasang alarm khusus clock in dan clock out pada telepon selulernya. Menurutnya, hal kecil yang dilakukan secara konsisten tersebut membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih disiplin. Kedisiplinan yang akan terbawa juga saat kita diberikan tanggung jawab dan pekerjaan yang lebih besar. Ibarat kata, kebiasaan yang baik jika dilakukan secara konsisten

akan membentuk karakter atau kepribadian.

Selain kedisiplinan, Ita juga menyampaikan filosofi apa yang dia jadikan pegangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. “Ketika sedang mendapatkan penugasan, saya berusaha menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu, dan tidak menunda-nunda. Selain itu, saya berusaha untuk melayani stakeholder dengan sepenuh hati”, Ita menambahkan, “seperti kata pepatah, apa yang dilakukan dengan hati, akan sampai juga ke hati.”

Ita selalu menanamkan pada dirinya bahwa bekerja merupakan salah satu bentuk ibadah. Dimana seperti bentuk ibadah lain yang dilakukan oleh umat beragama, maka harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, baik ketika di bawah pengawasan ataupun ketika tanpa pengawasan. Dengan pegangan tersebut, Ita merasa bahwa pekerjaan apapun merupakan sebuah bentuk amanah yang harus diselesaikan dengan semangat agar mendapatkan hasil yang optimal. Menurutnya, ketika pekerjaan dilakukan dengan sungguh-sungguh, kesalahan dalam pekerjaan yang berakibat merepotkan dan merugikan orang lain dapat diminimalisir.

Dalam bekerja, pasti ada hal-hal yang tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Maka agar dapat tetap bertahan dan bersemangat, Ita menyampaikan bahwa kita perlu motivasi kuat selama bekerja. Bagi Ita, motivasi dalam bekerja adalah untuk diri sendiri dan keluarga. Kenapa diri sendiri? Karena, ketika memilih untuk bekerja, di samping tetap menjalani peran menjadi seorang istri dan seorang ibu, baginya bekerja merupakan salah satu jalan agar dapat melakukan lebih banyak hal-hal baik. Kini, Ita yang mendapatkan penempatan di Majelis Sidang di Tempat Kedudukan (SDTK) Yogyakarta ini mengaku lebih bersemangat dalam melakukan

pekerjaan. Hal ini dikarenakan setelah sempat berpisah jarak dengan keluarganya, kini Ita sudah kembali berada di tengah hangatnya keluarga yang berada di Yogyakarta.

Perjuangan yang sempat Ita lalui, yaitu terpisah jarak dengan keluarga mungkin saat ini pun masih dirasakan oleh tidak sedikit pegawai Kementerian Keuangan lainnya. Karenanya, Ita pun turut mendoakan yang terbaik bagi rekan-rekan yang kondisinya masih terpisahkan jarak agar segera berada dekat dengan keluarga. Ita juga menyampaikan agar rekan-rekan pejuang LDR dapat tetap semangat bekerja, walau Ita tau betapa beratnya jauh dengan keluarga.

Ita juga menyampaikan ada masa dimana dia selalu memiliki tiket kereta setiap minggu, hingga tiga bulan ke depan, demi bertemu keluarga di Yogyakarta. Menurut Ita, ikhtiar yang dapat dilakukan adalah dengan tetap menjaga amanah dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Ita percaya bahwa hal tersebut dapat menjadi pembuka jalan agar berkumpul dengan keluarga, di waktu yang tepat. Selain itu, yang selalu menjadi pengingat untuk Ita tetap bersabar pada waktu itu adalah bahwa sekecil apapun hal baik yang dilakukan pasti suatu saat akan kembali lagi kepada kita.

Sebagai penutup, Ita menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pihak yang telah memberikan dukungan, baik dalam pekerjaan maupun dalam hal lain, yaitu rekan-rekan Set.PP, khususnya di Majelis IV, Majelis II, dan Majelis XIII. Dari mereka, Ita mendapatkan banyak contoh baik yang dapat dia teladani. Ita juga mendapatkan banyak pelajaran tentang bagaimana mewujudkan budaya kerja yang baik, sehingga Ita dapat menerapkan hal tersebut pada dirinya sendiri, yang mengantarkannya menjadi Pegawai Teladan Tahun 2021.

Teks: Mutia





WAJAH BARU GEN Z

Tak Kenal maka tak Sayang

Halo Sobat PP, Apa kabar nya nih? Tak terasa kita telah memasuki tahun baru 2022, di edisi baru ini di tahun ini marilah kita mulai dengan semangat baru.

Edisi TC Media kali ini hendak berbagi cerita tentang 3 pegawai baru yang menjadi anggota keluarga baru di Pengadilan Pajak. Siapa saja mereka? Yuk simak perkenalan Tim TC Media (tentunya sebagai perwakilan kita semua) untuk berkenalan dengan lebih jauh dengan rekan-rekan baru kita. *Check This Out!*

Yang pertama mari kita berkenalan dengan **Cyntya Simamora** dengan panggilan Cynthya. Dia lahir di Palembang 10 Januari 2001 (*welcome* generasi Z) merupakan alumni lulusan dari PKN STAN Prodi D3 dengan jurusan di Manajemen Aset pada tahun 2021. Saat ini Cynthya sekarang ditempatkan di Subbag Perlengkapan dan Rumah Tangga yang tentunya selaras dengan spesifikasi jurusan yang diambil saat berkuliah dahulu. Cynthya merupakan sosok yang memiliki beberapa hobi yang erat kaitannya dengan seni dan literatur, diantaranya menonton film/series/drama sama dengerin musik serta membaca beberapa buku nonfiksi khususnya yang terkait dengan self

improvement. Selain itu, sosok Cynthya juga menyukai bermain badminton sebagai salah satu hobi terkait dunia olahraga.

Dalam wawancara, Cynthya menuturkan bahwa belum memiliki gambaran penuh tentang unit Sekretariat Pengadilan Pajak secara khusus karena saat mengetahui akan ditempatkan di Unit Eselon 1 Sekretariat Jenderal, Cynthya cenderung hanya mengetahui unit terkait berupa biro-biro seperti biro hukum dan biro lainnya. Namun, Cynthya menuturkan bahwa ia merasakan penyambutan yang hangat ketika pertama kali bergabung di setpp. Cynthya menuturkan bahwa ia merasa senang saat bergabung dengan setpp dan langsung disambut oleh Bapak Sekretaris Pengganti-Bapak Dendi, Bapak Wakil Sekretaris-Bapak Budi, serta para beberapa Kabid, Kasubag, dan beberapa pegawai terkait. Cynthya menuturkan secara langsung bahwa kehangatan dan keramahan amat terasa di unit ini.

Hal unik yang menarik perhatian Cynthya ialah terkait dengan Gedung dimana SetPP berada dimana sebelumnya Cynthya melaksanakan OJT di Gedung Djuanda yang memiliki spesifikasi berbeda dari unit SetPP sendiri. Namun, seiring perjalanan

waktu Cynthya menuturkan memahami apa yang menjadi landasan yaitu terkait dengan independensi Pengadilan Pajak secara khususnya. Lebih lanjut, Cyntya menuturkan bahwa pengalaman bekerja sama dengan para atasan dan rekan kerja yang benar-benar memberikan banyak ilmu menjadikan SetPP memiliki daya tarik tersendiri.

Selanjutnya kita akan berkenalan dengan satu-satunya pujangga baru di Angkatan pegawai baru ini.

Sosok pujangga baru ini bernama **Muhammad Ramadhan Kurniawan** yang biasa dipanggil dengan nama Ramadhan. Pria kelahiran Sidoarjo, 22 tahun yang lalu ini merupakan lulusan D3 Pajak, PKN STAN yang sekarang ditempatkan di Majelis 11A. Ramadhan menyukai hal yang terkait dengan fotografi terkhususnya yang bertema alam ataupun jalanan. Selain itu, Ramadhan menyukai olahraga futsal dan badminton yang dimana semua hobi tersebut tertunda selama pandemi dan saat ini gawai di laptop menjadi andalannya dalam mengisi waktu luangnya.

Dalam wawancaranya, Ramadhan menuturkan tidak terlalu terkejut dengan penempatan di SetPP karena sudah mendapat “clue” terkhusus dari Bapak Wases, Bapak Budi bahwa Jabatan Pengadministrasi Pajak kemungkinan besar masuk SetPP atau Setkomwasjak. Penempatan ini menurut Ramadhan mendaya dukung yang optimal mengingat latar belakang pendidikannya yang berasal dari pajak sehingga memperoleh input yang semakin beragam.

Lebih lanjut, Ramadhan menuturkan lebih familiar dengan Pengadilan Pajak dibandingkan SetPP sendiri. Namun, setelah bergabung semakin memahami tuisi SetPP sebagai unsur pendukung administrasi Pengadilan Pajak.

Adapun kesan pertama yang diperoleh saat bergabung ialah secara khususnya Pak Ses-nya pada saat perkenalan yang sangat merangkul semua pegawai bahkan mengingat hal-hal yang detail atas masing-masing pegawai baru sehingga membuat pertemuan pertama tersebut begitu berkesan. Ramadhan juga menuturkan bahwa rekan kerja dan atasan di SetPP sedemikian membimbing sehingga konsep belajar santai, tapi serius amat dirasakan olehnya.

Angkatan Gen Z terakhir yang bergabung dengan SetPP ialah **Siti Mutiah Rahmadanti**. Muti lahir pada

tanggal 9 Desember 2000 merupakan lulusan PKN STAN tahun 2021 dan sekarang ditempatkan di Majelis VB.

Muti umumnya mengisi waktu senggang dengan membaca novel, sedangkan olahraga favoritnya adalah jalan kaki dengan contoh nyata jalan ke kantor hehe. Saat penempatan awal di SetPP, Muti tidak memiliki bayangan apapun melainkan cukup bertanya-tanya tentang SetPP itu sendiri. Seperti pepatah tak kenal maka tak sayang, dalam realitanya, Muti merasa senang dengan penempatannya disebabkan Muti mendapat banyak ilmu dan pelajaran yang tentunya membantu Muti untuk semakin berkembang.

Kemudian apa saja ya doa dan harapan para pegawai baru ini bagi SetPP? Simak ulasannya !

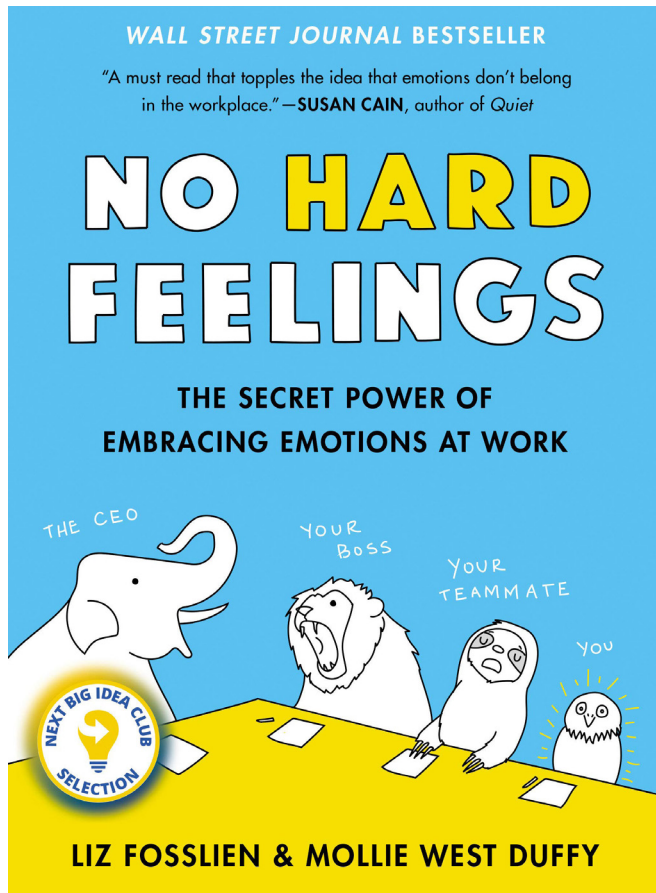
Cyntya dalam wawancaranya menyatakan semoga SetPP supaya terus giat dalam menunjukkan kemampuannya dan tetep solid baik internal maupun eksternal khususnya dengan unit setjen lainnya meski berbeda tempat, ingatlah kita masih satu atap. Lebih lanjut, Cyntya berharap SetPP bisa menemukan solusi terkait berkas yang masih numpuk, menjadi unit yang aktif menggiatkan eco-office systems melalui pengurangan penggunaan kertas dan juga pengelolaan sampah yang baik.

Selanjutnya dalam wawancara Ramadhan menuturkan harapannya semoga kondisi kantor SetPP semakin lebih baik dan tertata dengan lebih rapi mengingat banyaknya tumpukan berkas-berkas terkait sengketa.

Adapun harapan Muti untuk Setpp semakin baik dari segala aspek. Semoga semakin bersinergi dan senantiasa menjaga kekompakan dan kebersamaan. Mungkin salah satunya dengan mengadakan fasilitas berupa ruangan yang mendukung flexible working space dimana majelis maupun bagian dapat bekerja di ruangan tersebut sehingga tidak terpisahkan oleh gedung yang berbeda.

Teks: Tirta

MENGONTROL EMOSI DI LINGKUNGAN KERJA



“... dinamika emosional berpengaruh terhadap motivasi, kesehatan, komunikasi, pengambilan keputusan, dan lainnya. Namun banyak dari kita yang mengabaikan emosi ini. Lalu mengapa kita bisa berbicara tentang profesionalisme bila kita masih punya pemikiran bahwa kita harus memendam semua yang kita rasakan?” – No Hard Feeling, hal 4

Bedah Buku - No Hard Feeling (The Secret Power of Embracing Emotions at Work)

Buku berjudul No Hard Feeling – The Secret Power of Embracing Emotions At Work ini membahas tuntas mengenai pengendalian emosi di lingkungan kerja, bagaimana kita bisa merangkul emosi, menjadi lebih autentik, dan berpuas diri namun tetap profesional. Buku karangan Liz Fosslien dan Mollie West Duffy ini disertai dengan visual-visual yang menarik serta contoh kejadian sehari-hari yang terasa dekat dengan kita.

Berikut beberapa hal yang dibahas di dalam buku No Hard Feeling.

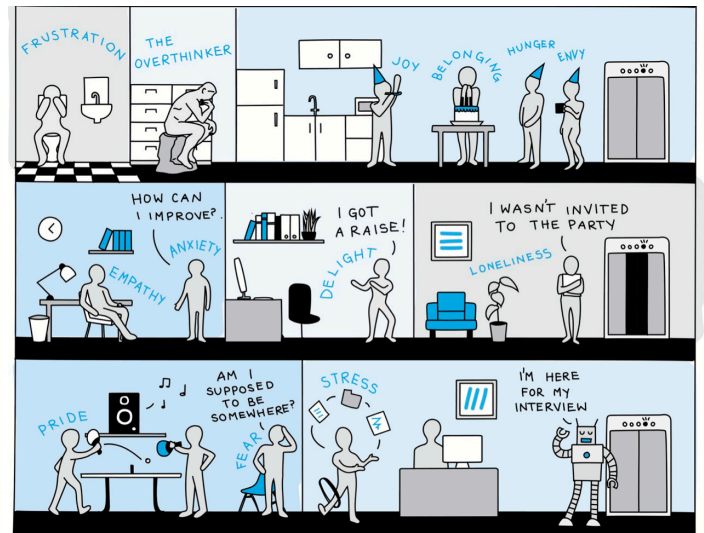
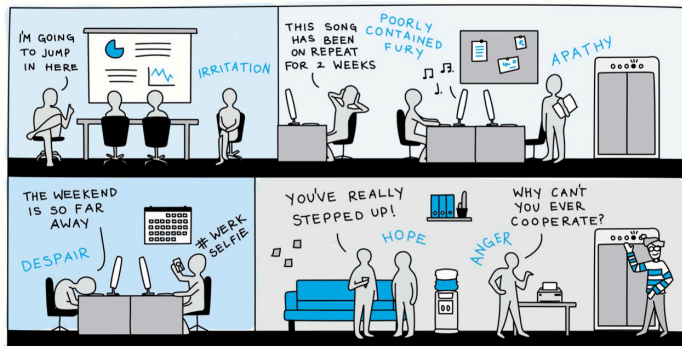
Emosional dan Kesehatan

Banyak yang mengira bahwa pengendalian emosi berpengaruh terhadap kesehatan mental. Namun ternyata emosi yang tidak terkendali juga menjadi sumber penurunan kesehatan fisik. Pekerjaan yang menguras emosi akan menjadi pemicu stress pada otak. Akibatnya anggota tubuh lain akan terpengaruh seperti detak jantung yang meningkat, tekanan darah yang naik, napas yang lebih cepat, pencernaan melambat, tubuh gemetar, dan lain sebagainya. Dalam jangka panjang tentu akan menimbulkan efek yang lebih buruk.

Untuk mengendalikan emosi tentu saja tidak bisa dilakukan dengan instan. Menurut penulis buku ini, ada beberapa cara untuk mencegah dan mengatasi. Yang pertama yaitu istirahat. Mulai dari berlibur, *night off*, membatasi kegiatan di luar pekerjaan utama, *mini-break* atau istirahat singkat, dan ritual setelah kerja bisa menjadi alternatif istirahat Anda dalam bekerja.

Kedua, berhentilah merasa bersalah apabila anda merasa sedih atau lelah. Membicarakan masalah yang terjadi pada saat bekerja dengan rekan kerja dapat menjadi salah satu alternatif yang sehat. Namun harus tetap berfokus pada solusi bukan sekedar menjadi sarana pelampiasan semata.

A DAY AT THE OFFICE



Kecerdasan Emosional dan Pengambilan Keputusan

Pembahasan mengenai kecerdasan emosional mulai merebak seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap kejadian-kejadian yang menyangkut psikologis. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk mengakui, memahami, dan mengekspresikan emosi serta menggunakan empati untuk berhubungan dengan orang lain. Kecerdasan emosional dipercaya berpengaruh di lingkungan pekerjaan dengan wujud kerja sama dengan orang lain, pengelolaan konflik, dan pengambilan keputusan.

Emosi bukan merupakan sinyal mistis. Emosi juga terbentuk dari pengalaman, pemahaman, dan banyak informasi yang pernah dialami sebelumnya. Oleh karena itu, untuk pengambilan keputusan, emosi tentu sangat berperan penting. Namun yang harus disadari adalah bahwa mendengarkan emosi Anda bukan berarti harus mengekspresikannya secara harafiah. Kemampuan untuk bisa memisahkan emosi yang relevan dan tidak relevan menjadi kunci kesuksesan pengambilan keputusan. Contohnya bila Anda mengalami resah menghadapi *assessment* untuk esok hari, berarti Anda bisa mencari penanganan seperti misalnya membaca kembali esai yang telah Anda tulis. Dalam kasus ini, keresahan tersebut merupakan emosi yang relevan dan bukan emosi yang buruk.

Work-life-mentally-balanced

Setelah apa yang sering digembar-gemborkan terkait *work-life-balance*, banyak juga yang masih merasa tidak produktif dan malah lebih suka melakukan kegiatan sampingan saat pekerjaan utama masih dijalankan. Ini juga salah satu pertanda antara *work-life* belum dijalani secara seimbang secara mental dan emosional.

Pengendalian emosi pada suasana kerja dan suasana keseharian di luar kerja menjadi kunci terciptanya *work-life balance*. Nyatanya banyak permasalahan di rumah terbawa ke ruang kerja dan sebaliknya. Selain kegiatan yang harus seimbang, pengendalian emosi juga harus dijaga. Terlebih lagi pelaksanaan *work from home* membuat batasan antara pekerjaan kantor dan rumah menjadi lebih bias.

Beberapa tips terkait motivasi, bagaimana menghadapi tim, cara berkomunikasi, membentuk budaya, dan kepemimpinan juga dapat Anda temukan pada buku ini.

Tujuan akhir dari pengendalian emosi ini tentu saja menjadi individu yang produktif yang dapat berfungsi dengan maksimal sehingga bermanfaat untuk orang lain. Lantas, apakah Anda boleh *baper* saat bekerja? Jawabannya adalah boleh, apabila Anda sudah meresapi poin-poin yang dituliskan pada buku ini.

Teks: ADP

Cerita dari Dua Puluh



G20 PRESIDENCY OF INDONESIA

RECOVER TOGETHER RECOVER STRONGER



Sebagai bagian dari komunitas masyarakat internasional, negara-negara di dunia perlu membentuk suatu pola kerja sama. Salah satu dari pola kerja sama negara-negara di dunia adalah *Group of Twenty* atau yang lebih dikenal dengan G20. Negara-negara yang tergabung dalam grup ini adalah dua puluh negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) besar di dunia. PDB dari dua puluh negara tersebut jika digabungkan setara dengan 80% Produk Domestik Bruto dunia.

G20 pertama kali dibentuk pada tahun 1999 atas inisiasi negara G7 dalam rangka menanggapi krisis ekonomi Asia pada tahun 1998. Awalnya pertemuan negara-negara G20 hanya diperuntukkan bagi pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang berfokus membahas masalah ekonomi dan keuangan. Pada saat itu, G20 belum mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dihadiri oleh kepala negara. KTT G20 baru diselenggarakan pada tahun 2008 sebagai respon menyikapi krisis global pada tahun 2008. Untuk selanjutnya, pertemuan G20 tidak hanya membahas mengenai isu keuangan, tetapi juga merambah ke isu lain

yang menjadi wadah pembentukan *Sherpa Track*.

G20 sendiri tidak memiliki sekretariat. Pertemuan-pertemuan tersebut diselenggarakan berdasarkan sistem presidensi. Setiap negara anggota secara bergilir mendapat kesempatan untuk menjadi presidensi G20. Untuk tahun 2022, presidensi dipegang oleh Indonesia. Penyerahan presidensi tersebut dilaksanakan pada saat penutupan KTT G20 dari presidensi sebelumnya kepada presidensi selanjutnya. Untuk tahun 2021, presidensi dipegang oleh Italia, sedangkan untuk tahun 2023 presidensi dipegang India. Negara-negara pemegang presidensi untuk tiga tahun secara berurutan dikenal dengan istilah Troika. Troika sendiri berasal dari bahasa Rusia yang memiliki makna bahwa kepemimpinan dipegang oleh tiga pihak. Indonesia yang ditunjuk menjadi presidensi G20 tahun 2022 membentuk pola troika dengan Italia sebagai presidensi tahun 2021 dan India sebagai presidensi tahun 2022.

Struktur G20 terdiri dari *Finance Track*, *Sherpa Track*, dan beberapa *Engagement Group*. Elemen-elemen tersebut puncaknya akan



©2021 Biro Pers, Media, dan Informasi S

bertemu pada saat KTT G20 yang dihadiri oleh kepala negara. Khusus Finance Track, pertemuan akan dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Sentral. Pada presidensi Indonesia tahun 2022, pertemuan Finance Track terbagi dua, yaitu pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral dan pertemuan tingkat deputy. Pertemuan pertama tingkat deputy sendiri dilaksanakan di Nusa Dua Bali pada tanggal 7 s.d. 8 Desember 2021. Pertemuan pertama tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 15 s.d. 18 Februari 2022.

Delegasi yang diundang pada setiap pertemuan G20 tidak hanya berasal dari negara anggota, tetapi juga dari negara yang diundang negara presidensi, seperti negara ASEAN dan pasifik. Di samping itu, terdapat juga delegasi dari organisasi-organisasi internasional dan negara yang selalu diundang pada pertemuan tersebut walaupun tidak tergabung dalam G20, seperti Singapura dan Spanyol. Pertemuan G20 saat ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu delegasi dapat memilih untuk hadir secara tatap muka di Indonesia ataupun secara virtual melalui telekonferensi.

Pada presidensi G20 Indonesia tahun 2022, tema yang diusung adalah *Recover Together, Recover Stronger*. Maksud dari tema tersebut adalah bahwa Indonesia melanjutkan peranan mewujudkan pemulihan ekonomi dan kesehatan dunia yang inklusif. Dengan tema dan semangat ini, G20 memastikan bahwa kesepakatan yang diambil oleh G20 relevan tidak hanya bagi negara anggota, tetapi juga bagi seluruh dunia, terutama bagi negara berkembang yang membutuhkan kerja sama global untuk pulih dari dampak Covid-19. Sementara itu, logo yang diambil adalah gunung dengan kombinasi batik kawung yang terinspirasi dari budaya Indonesia. Motif gunung memiliki filosofi menggambarkan kehidupan di alam semesta, khususnya pada perpindahan menuju babak baru yang merefleksikan optimisme untuk pulih dan berguna bagi masyarakat.



Teks: Hafiz



STUDI BANDING PENGADILAN PAJAK

Transformasi menjadi tajuk hangat di Pengadilan Pajak sejak tahun 2021 hingga saat ini. Berbagai perubahan demi perubahan dilewati dengan cepat dibawah tekanan pandemi Covid-19. Mulai dari penutupan layanan, mekanisme antrean online, sampai dengan persidangan yang dilaksanakan secara hybrid antara sidang elektronik dengan sidang tatap muka secara langsung. Perubahan yang didasari oleh keterbatasan saat pandemi ini ternyata berlanjut menjadi tuntutan perubahan jaman yang tidak dapat dihindarkan.

Saat ini Pengadilan Pajak sedang memiliki program besar untuk dapat mensukseskan percepatan implementasi “e-Tax Court”. Pengadilan Pajak yang sepenuhnya menganut system digital dan paperless merupakan harapan kita bersama, baik dari sisi pihak eksternal maupun internal di Sekretariat Pengadilan Pajak. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Sekretariat Pengadilan Pajak sedang mengerjakan sebuah *project* penelitian studi banding dengan negara lain untuk menemukan formulasi yang tepat dan cocok untuk diimplementasikan terkait digitalisasi penyelesaian sengketa perpajakan.

Negara yang akan dijadikan target studi banding

Saat ini Tim Studi Banding sudah menentukan negara-negara yang menjadi ruang lingkup penelitian antara lain Singapura, Belgia, Hong Kong, Jepang, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara tersebut dipilih karena selain dipandang cukup maju dalam hal teknologi dan memiliki infrakstruktur yang cukup modern, negara-negara tersebut juga memiliki Atase Keuangan yang dapat memudahkan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan informasi yang kredibel.

Atase Keuangan sendiri adalah seseorang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk ditempatkan

di Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara lain untuk dapat mewakili kepentingan pemerintah di Indonesia dan melaksanakan hubungan Kerjasama internasional. Atas dasar fungsi tersebut maka Tim Studi Banding PP berkorespondensi dengan Atase Keuangan di negara-negara yang telah ditunjuk untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam studi banding.

Ruang Lingkup Studi Banding

Adapun ruang lingkup yang menjadi objek penelitian studi banding adalah terkait dengan proses penyelesaian sengketa pajak, digitalisasi sistem penyelesaian sengketa pajak, perubahan peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan digitalisasi, dan termasuk juga *change management* dalam melakukan modernisasi dan digitalisasi. Topik-topik tersebut dianggap perlu sebagai masukan bagi Pengadilan Pajak untuk dapat mengimplementasikan transisi dari sistem konvensional ke sistem e-Tax Court dengan lancar dan mengikuti ketentuan *good governance* yang ideal.

Selain hal-hal tersebut di atas, penelitian juga mencakup analisis terkait trend jumlah sengketa pajak di negara tujuan studi banding. Hal ini perlu dilakukan untuk menganalisa kesesuaian apabila kebijakan di negara tersebut ingin diterapkan di Indonesia. Jika di satu negara telah memberlakukan sistem yang sudah modern namun apabila ditinjau lebih lanjut kasus sengketa perpajakan tahunan yang terjadi hanya sekitar 10% dari sengketa perpajakan yang ada di Indonesia, maka belum tentu kebijakan yang diberlakukan di negara tersebut benar-benar sesuai diberlakukan di Indonesia.

Hasil yang Diharapkan

Pengadilan Pajak sebenarnya telah memiliki rencana dan arah yang jelas terkait dengan implementasi transformasi dan modernisasi penyelesaian sengketa perpajakan ini. Sehingga hasil yang diharapkan dari studi banding ini bukanlah semata-mata terkait sistem digital di negara-negara lain melainkan juga ingin memetakan secara lebih mendalam terkait dengan dinamika pengelolaan sengketa perpajakan secara digital serta *change management* dari transformasi sistem tersebut. Mengingat *stakeholder* atau pengguna layanan di Pengadilan Pajak terdiri dari banyak orang dengan latar belakang yang berbeda, maka setiap perubahan juga harus bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan yang dapat dipahami oleh masyarakat di berbagai kalangan. Hasil dari studi banding ini diharapkan dapat memperkaya perspektif bagi Pengadilan Pajak sehingga perubahan dan kebijakan di masa depan bisa tetap bersifat inklusif dan dapat mempermudah masyarakat secara luas.

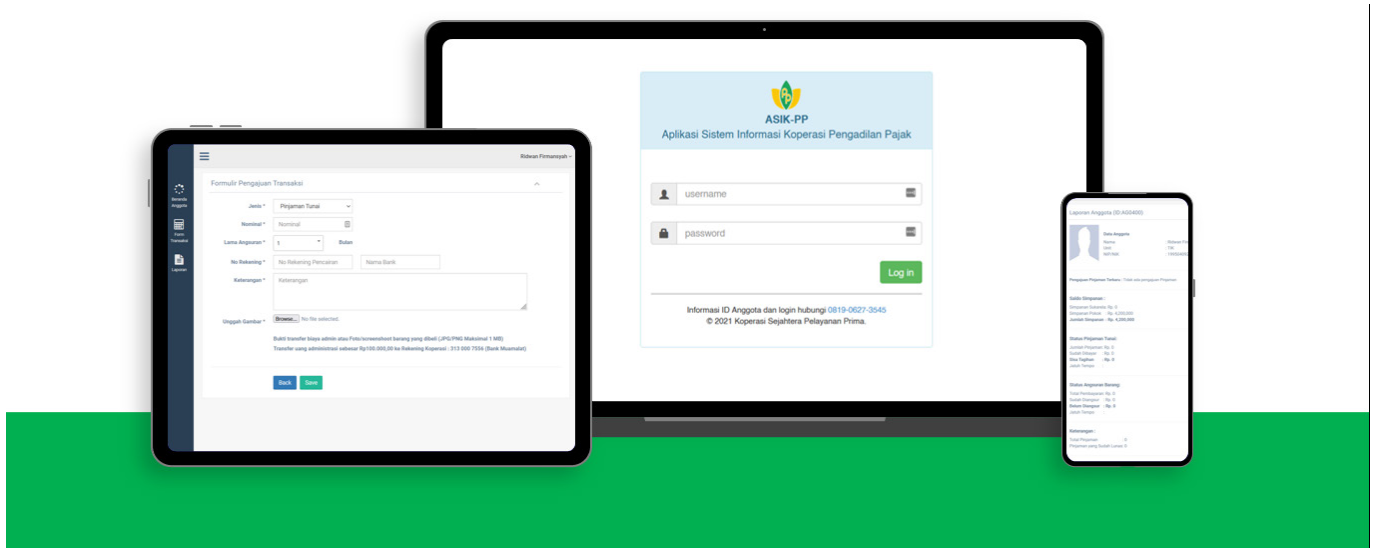


Tantangan yang dihadapi Tim Studi Banding Pengadilan Pajak

Saat ini, dalam melakukan studi banding yang menjadi tantangan terbesar adalah pada proses dimana tim peneliti bisa memisahkan perbedaan-perbedaan yang mendasar pada masing-masing negara namun tetap mampu menarik benang merah yang sekiranya dapat diadaptasi di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing negara memiliki karakteristik yang berbeda sehingga tidak akan mungkin suatu negara bisa mengadaptasi kebijakan negara lain secara utuh. Seluruh tim peneliti perlu mengedepankan kerangka berpikir tentang bagaimana dapat menemukan hal yang bisa diadaptasi dan memikirkan cara untuk dapat memodifikasinya dengan menyesuaikan dengan karakteristik organisasi di negara tersebut. Dengan kata lain, tim ingin mencari “*best fit*” policy bukan hanya “*best practice*” policy.



Teks: Penny



KOPERASI dalam ASIK-PP

Inovasi Aplikasi Koperasi Pengadiln Pajak

Pada tahun 2022 Koperasi Pengadiln Pajak atau yang dikenal dengan nama Koperasi Sejahtera Pelayan Prima melakukan inovasi dengan meluncurkan sebuah aplikasi baru. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi berbasis website yang akan memberikan kemudahan bagi anggota dan pengurus dalam mengelola aktivitas dan transaksi pada koperasi.

Aplikasi Sistem Informasi Koperasi Pengadiln Pajak atau disingkat **ASIK-PP** dapat diakses menggunakan browser di laman <https://sejahterapp.com>. Meskipun berbasis *website*, ASIK-PP tetap ramah gawai karena mudah diakses meskipun melalui *smartphone*.

Untuk dapat menggunakan ASIK-PP ini, anggota harus memiliki akun terlebih dahulu. Pada dasarnya semua anggota sudah memiliki akun, kecuali anggota non aktif atau keluar dari keanggotaan koperasi. Untuk mendapatkan akun tersebut anggota bisa menghubungi kontak yang tertera saat membuka laman <https://sejahterapp.com>. Anggota akan diberikan nomor anggota yang nantinya akan digunakan sebagai *username* serta *password* untuk masuk. Dan untuk alasan keamanan, anggota diharapkan langsung mengganti *password* yang diberikan.

Terdapat dua menu utama yang bisa diakses oleh anggota ketika menggunakan aplikasi, yaitu:

1. Beranda

Pada menu ini anggota dapat melihat informasi keanggotaan, saldo, status pinjaman tunai dan pembelian barang yang dimiliki. Apabila sebelumnya anggota yang ingin mengetahui status saldo-saldo tersebut harus bertanya terlebih dahulu kepada pengurus, saat ini semua informasi tersebut dapat diketahui melalui aplikasi dengan mudah.

2. Form Transaksi

Pada menu ini anggota dapat melihat history pengajuan yang pernah dilakukan baik itu pengajuan tunai atau pembelian barang yang sudah lengkap dengan data-data dan statusnya. Selain itu pada menu ini anggota juga dapat melakukan pengajuan baru untuk pinjaman tunai maupun pembelian barang.

Selain dua menu tadi, terdapat kemudahan lain yaitu penambahan fitur pada form pengajuan. Saat ini *form* sudah dinamis dan akan mengikuti kebutuhan pengajuan anggota. *Field* pada *form* akan

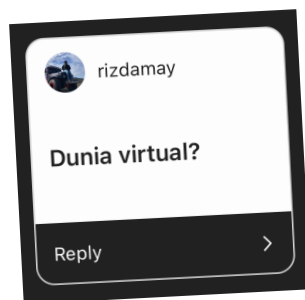
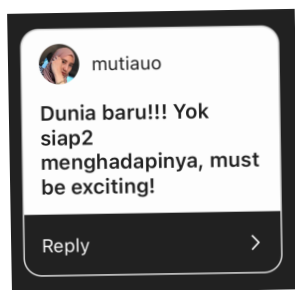
menyesuaikan ketika anggota memilih pembelian barang ataupun pinjaman tunai. Jadi hanya dibutuhkan satu form untuk dua jenis pinjaman dan tidak perlu berbeda laman apabila ingin mengajukan jenis pinjaman yang berbeda. Selain itu terdapat fitur simulasi pembayaran yang akan otomatis muncul di bawah form ketika field nominal pinjaman dan lama angsuran sudah diisi. Sehingga anggota dapat memperkirakan dan merencanakan angsurannya lebih baik.

Selain kemudahan pelayanan yang semakin ditingkatkan melalui aplikasi, Koperasi Sejahtera Pelayanan Prima juga memiliki penawaran menarik. Saat ini limit pinjaman tunai Koperasi Sejahtera Pelayanan Prima ditingkatkan menjadi Rp 40.000.000,- untuk angsuran selama dua puluh kali. Dan juga pada unit pembelian barang, saat ini anggota sudah bisa mengajukan pembelian mobil dengan skema yang cukup menarik. Untuk informasi lebih lanjut, bisa langsung menghubungi pengurus Koperasi Sejahtera Pelayanan Prima.

Teks: Rid

Word of Month: **METaverse**

Menurut kamu,
metaverse itu apa
siah?



Metaverse saat ini sedang menjadi topik perbincangan yang hangat di berbagai kanal sosial media. Hal ini bermula dengan diubahnya nama “Facebook” menjadi “Meta”. Dalam video yang dipublikasikan dalam Facebook Connect, Mark Zuckerberg memberikan penjelasan yang lengkap terkait dengan konsep Metaverse yang sedang dirancang oleh Meta.

Penafsiran yang timbul terhadap kata Metaverse cukup beragam di kalangan masyarakat. Namun dari penafsiran yang muncul secara organik di kalangan masyarakat, metaverse merupakan dunia digital yang diciptakan oleh manusia yang memungkinkan di masa mendatang manusia dapat berkumpul dan berkomunikasi secara virtual. Tidak hanya berkomunikasi namun secara lebih menakjubkan, dalam Metaverse manusia juga bisa membangun kehidupannya secara virtual, mulai dari memiliki kekayaan dalam dunia virtual sampai dengan melakukan mekanisme jual beli barang.

Berbagai polemik muncul atas kemunculan fenomena Metaverse ini dimana sebagian menganggap hal tersebut akan membawa dampak yang justru lebih buruk terhadap masyarakat karena akan sulit memisahkan interaksi sosial secara nyata maupun virtual. Namun beberapa pihak juga menyambutnya dengan positif dan menganggap Metaverse adalah salah satu bentuk transformasi dunia teknologi yang akan membawa banyak kemudahan dan peluang bagi masyarakat di seluruh dunia.

Sebagai masyarakat kita dituntut untuk tetap bijak dalam menyikapi hal ini dengan banyak mengedukasi diri terkait dengan perkembangan Metaverse. Dengan memiliki pengetahuan yang baik, kita akan bisa menganalisis sejauh apa batasan teknologi bisa diterima oleh nilai-nilai yang kita tetapkan dalam hidup kita sebagai manusia.

Tim TC Media telah menanyakan kepada beberapa SobatPP terkait opini mereka terkait Metaverse. Simak yuk!

Teks: Penny

It's TACO Time!

RKMD

Kepikiran apa?



Co, pernah kepikiran ga sih?



Yaa, terus?



Ruangan kerja kita kan
lagi renovasi jadi RKMD.



Nah, kalau misal nanti udah selesai,
berarti ruangan itu kan ada di masa sekarang ya?
Kalau gitu namanya bukan RKMD lagi dong, tapi RKMS.
Ruang kerja masa sekarang.

Auk ah....



Bener kan?
Jadinya Ruang Kerja Masa Sekarang kan?





CALL FOR ARTICLE

Yang saya hormati para pembaca setia TCMedia

Kami mengundang seluruh Hakim/Pejabat/Pegawai
Pengadilan Pajak untuk berpartisipasi dengan
mengirimkan Cerita Pendek, Artikel, maupun Opini

yang dapat diunggah pada tautan berikut:

bit.ly/TCMediaCallForArticle

Kami tunggu partisipasi Anda, terima kasih.



Tim TCMedia

